

Pepolit (Pendidikan Politik Tentara): Desain Postur Tentara (kaum) Kiri

Kusuma

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

Abstrak

Tulisan membahas dinamika pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada masa awal kemerdekaan, yang dipengaruhi oleh situasi politik global dan internal. Setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan terbesar dalam pembentukan tentara nasional adalah keinginan Belanda yang didukung Sekutu untuk kembali menguasai Indonesia. Di dalam negeri, pengaruh ideologi politik yang berkembang menciptakan ketegangan dalam membentuk postur tentara nasional. Amir Sjarifuddin, sebagai Menteri Pertahanan, memperkenalkan konsep "Tentara Rakyat," yang bertujuan menjadikan tentara dekat dengan rakyat dan selaras dengan tuntutan revolusi. Melalui program Pepolit (Pendidikan Politik Tentara), Amir berusaha menyebarkan ideologi sosialis dalam tubuh tentara, yang memicu konflik dengan kelompok tentara reguler yang berasal dari eks-KNIL dan Peta. Program Pepolit akhirnya menimbulkan ketegangan antara militer dan pemerintah, karena dianggap sebagai upaya untuk menyebarkan komunisme. Meskipun demikian, dengan adanya dualisme dalam pertahanan nasional, pada tahun 1947 pemerintah menyatukan tentara reguler dan laskar perjuangan ke dalam TNI. Namun, pengaruh ideologi kiri tetap bertahan hingga pemberontakan Madiun pada 1948 dan puncaknya pada peristiwa di tahun 1965. Pepolit merupakan tonggak awal upaya penguasaan tentara oleh kaum kiri di Indonesia.

Pepolit (Army Political Education): Design of the Posture of the Left Army

Abstract

The article discusses the dynamics of the formation of the Indonesian National Army (TNI) in the early days of independence, which was influenced by the global and internal political situation. After the proclamation of independence, the biggest challenge in the formation of the national army was the desire of the Dutch, supported by the Allies, to regain control of Indonesia. Domestically, the influence of developing political ideologies created tensions in forming the posture of the national army. Amir Sjarifuddin, as Minister of Defense, introduced the concept of the "People's Army," which aimed to make the army close to the people and in line with the demands of the revolution. Through the Pepolit (Army Political Education) program, Amir attempted to spread socialist ideology within the army, which sparked conflict with groups of regular soldiers from the ex-KNIL and Peta. The Pepolit program eventually caused tensions between the military and the government, because it was considered an attempt to spread communism. However, with the dualism in national defense, in 1947 the government united the regular army and the struggle troops into the TNI. However, the influence of left-wing ideology persisted until the Madiun rebellion in 1948 and peaked in the events of 1965. Pepolit was the initial milestone in the leftist movement's efforts to control the army in Indonesia.

Kata Kunci

Tentara Nasional Indonesia,
Pepolit,
Tentara Rakyat,
Ideologi Politik

Keywords

Indonesian National Army,
Pepolit,
People's Army,
Political Ideology

Pendahuluan

Pembentukan tentara di awal kemerdekaan bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini disebabkan politik penjajahan Belanda yang ingin tetap menguasai Indonesia dan kekalahan Jepang dalam perang dunia kedua oleh sekutu. Keadaan Indonesia yang baru merdeka masih dibayangi oleh politik global yang tidak membiarkan Indonesia lepas dari penjajahan. Belanda yang dibantu sekutu masih ingin berkuasa dan tetap berada di nusantara sedangkan Jepang yang kalah perang diperintahkan sekutu untuk menjaga *status quo* wilayah Indonesia.

Kondisi seperti itu yang menyebabkan pemerintah Indonesia tidak segera membentuk tentara nasional. Di dalam negeri ideologi politik yang berkembang saat itu memungkinkan memengaruhi postur tentara nasional yang akan dibentuk. Ini yang disebut bahwa tentara nasional Indonesia adalah tentara yang tumbuh bukan tentara yang dicipta. Di bagian lain progresivitas kaum kiri yang ingin menguasai tentara berusaha untuk memberikan pengaruh secara ideologis pada tentara, dari sini mulai digagas adanya pendidikan tentara berdasar versinya yang ingin dijadikan sebagai postur tentara nasional. Pepolit (Pendidikan Politik Tentara) merupakan satu dari gagasan yang berkembang di awal kemerdekaan dan gagasan lain setelahnya bahkan sampai dengan tahun 1965. Tulisan ini mendeskripsikan tentang desain postur tentara yang diinginkan oleh kaum kiri Indonesia.

Pembentukan Tentara Nasional

Badan Keamanan Rakyat (BKR), badan-badan perjuangan dan kesatuan-kesatuan polisi merupakan organisasi-organisasi bersenjata yang lahir di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Pada rapat kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945, agendanya membentuk tentara kebangsaan. Pada 22 Agustus 1945 PPKI membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan; (1) Komite Nasional Indonesia (KNI), (2) Partai Nasional Indonesia (PNI), dan (3) Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sedangkan pada 23 Agustus 1945 ketiga badan tersebut diumumkan ke publik. Sementara itu badan-badan perjuangan yang bukan bentukan pemerintah seperti: (1) Golongan pemuda yang tidak puas atas pembentukan BKRI; (2) Kelompok-kelompok gerakan bawah tanah selama masa pendudukan Jepang; (3) Pemuda yang berafiliasi kepada aliran politik seperti: Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (Bara), Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (P3I), Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Pemberontak Republik Indonesia (BPRI), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Buruh, AMPAL, Barisan Pemuda Indonesia (BPI); (4) Pemuda yang berafiliasi kepada aliran agama seperti Hizbullah dan Sabilillah; (5) Barisan Pelopor yang dibentuk Jepang sejak 3 September 1945 bernaung di bawah Komite Nasional Indonesia, dan (6) Badan Bersenjata yang didirikan Partai Politik.

Perbedaan dan Persamaan BKR dengan Badan Perjuangan adalah BKR menganggap dirinya sebagai pejuang bersenjata yang aktif dalam bidang sosial politik di KNI sedangkan Badan Perjuangan tidak aktif. Sementara persamaannya adalah mereka sesama pejuang. KNI sebetulnya wadah mereka tetapi kenyataannya tidak demikian. Di samping BKR dan Badan Perjuangan terdapat pula pemuda-pemuda dari polisi.

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 23 Agustus 1945 yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno melalui pidato di radio mendapatkan respons kurang puas dari golongan pemuda. Mereka yang memiliki peran dalam terlaksananya proklamasi kemerdekaan lebih menginginkan adanya tentara nasional dan menyatakan tidak puas terhadap BKR. Oleh karena itu pada awal pembentukan tentara itu terdapat beberapa persoalan yang menonjol yaitu adanya Tentara masyarakat atau tentara bagian masyarakat yang merupakan istilah untuk menyebut golongan militer yang di dalamnya terdiri atas badan-badan perjuangan dan laskar

rakyat. Hal itu yang menyebabkan kalangan muda mendirikan badan-badan perjuangan yang bersatu di dalam Komite van Aksi yang bermarkas di Jalan Menteng 31 dengan pimpinannya, seperti Adam Malik, Sukarni, Chairul Saleh, dan Maruto Nitimihardjo. Komite van Aksi menaungi Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Barisan Buruh Indonesia (BBI), Barisan Banteng, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Hizbullah, Sabilillah, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI), Tentara Pelajar (TP), dan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP). Kedua kelompok itu berada di bawah naungan biro perjuangan kementerian pertahanan.

Pada 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan dekret terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Melalui siaran radio dan surat kabar, pemerintah mengumumkan maklumat yang berbunyi: "Maklumat Pemerintah, Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat." bertempat di Jakarta, tertanggal 5 Oktober 1945 ditandatangani Presiden Republik Indonesia Soekarno. Tampaknya Presiden Soekarno menyadari bahwa tentara nasional perlu dibentuk. Akhirnya dipanggilah pensiunan KNIL, Mayor Oerip Soemohardjo dari Yogyakarta agar datang ke Jakarta untuk menyusun tentara nasional. Dengan adanya maklumat Pemerintah 5 Oktober 1945 itu maka berdirilah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Soeprijadi ditunjuk sebagai pemimpin TKR, serta Mohammad Suljoedikusumo diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat. Kemudian Oerip Soemohardjo membentuk Markas Tertinggi TKR di Yogyakarta yang mempunyai 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di Sumatera.

Pembentukan Badan Pendidikan Tentara

Di Yogyakarta pada bulan November 1945 diadakan Konferensi TKR. Di dalam konferensi tersebut terdapat usulan pembentukan suatu badan pendidikan tentara dan pada 14 November 1945, Amir Sjarifuddin ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Amir menghendaki agar semua aparatur negara sejalan dengan tuntutan revolusi. Karena itu, begitu menempati jabatan Menteri Pertahanan, Amir segera mengintegrasikan tentara nasional dalam garis revolusi. Sebagai konsekuensinya, mengadakan tindakan koreksi yang bermakna mengubah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan revolusi. Saat itu di tubuh tentara ada persoalan karena Pimpinan Tentara saat itu berasal dari dua kelompok. Kelompok pertama berasal dari sisa-sisa KNIL (Tentara Kerajaan Hindia-Belanda) yang kaum kiri mencap opsir-opsir eks-KNIL sebagai "buruh kolonial, kurang kesadaran nasional, dan lebih mementingkan organisasi ketimbang semangat" di antaranya adalah, Kolonel Nasution, Kolonel Simatupang, dan Kolonel Suryadharma.

Kelompok kedua adalah serdadu bekas didikan Jepang, yakni Peta dan Heiho, yang dianggap mewarisi jiwa fasistik Jepang. Salah satu tokohnya adalah Jenderal Soedirman. Kedua unsur di atas dianggap menyisakan mental penjajah (Belanda dan Jepang). Sementara, sejak bergolaknya Revolusi Agustus 1945, pemuda dan rakyat telah ambil bagian dalam perjuangan bersenjata. Mereka telah membentuk Laskar Rakyat dan Amir menyatakan bahwa yang berjuang untuk kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan tentara tetapi seluruh Rakyat.

Kekuatan tentara Indonesia ketika itu terdiri dari dua unsur, yakni, kesatuan militer formal- terlatih (eks KNIL dan Peta/Heiho) dan Laskar-Laskar Rakyat. Amir mengusung konsep Tentara Rakyat atau tentara masyarakat. Baginya, kekuatan pertahanan harus dibangun di atas kekuatan rakyat. Amir menghendaki tentara adalah tentara rakyat, tidak boleh bersifat elitis, karena apabila terpisah dari rakyat, mereka tidak berdaya apa-apa. Amir memang tidak suka dengan TRI yang terdiri dari para tentara produk penjajah yang menurutnya tak layak dipercayai. Amir menilai para mantan *Koninklijk Nederlands Indisch Leger* (KNIL) tak lebih dari

tentara bayaran Belanda yang telah sudi menindas bangsa sendiri. Begitu juga tentara Pembela Tanah Air (Peta) yang merupakan hasil didikan sekaligus antek Jepang. Soedirman merupakan bekas Peta dianggap berada di dalamnya.

Dinamika perkembangan organisasi militer saat itu terus berjalan. Pada 1 Januari 1946 TKR (Tentara Keamanan Rakyat) diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan pada 24 Januari 1946 Dekrit Presiden Soekarno mengubah TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Di sisi lain usulan pada konferensi November 1945 disetujui dan direalisasikan pada 24 Januari 1946 lalu dibentuklah komisi yang di dalamnya terdapat anggota yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat dengan tugas menetapkan garis-garis besar pendidikan tentara dan Badan Pendidikan dengan merumuskan pendidikan bagi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Pada tanggal 19 Februari 1946, Amir mengumumkan bahwa sebuah Staf Pendidikan telah dibentuk di dalam lingkungan kementeriannya. Tugasnya adalah untuk meletakkan garis-garis pedoman bagi pendidikan politik tentara. Dalam pengumuman itu dikatakan: Pendidikan itu materinya tidak akan berupa pandangan-pandangan politik dari suatu partai politik atau pendapat suatu golongan tertentu, melainkan ideologi yang sudah tercakup dalam UUD. Garis-garis besar ideologi ini akan ditetapkan oleh sebuah komisi untuk menjamin bahwa seluruh materi yang diberikan kepada anggota-anggota tentara akan mempunyai landasan ideologis yang terdapat dalam UUD. Di antara para pendidikannya akan terdapat juga ahli-ahli mengenai agama Islam, sehingga segala propaganda bagi tentara di dalam Staf Pendidikan akan dapat diselaraskan dengan ajaran agama. Sementara itu pada 23 Februari 1946 Presiden melalui Penetapan Presiden membentuk Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara yang tugasnya adalah menyusun: bentuk ketentaraan, kekuatan tentara, organisasi tentara, menyempurnakan bentuk peralihan dari TKR ke TRI dan menentukan status laskar dan badan perjuangan. Dan pada 24 Mei 1946 dilangsungkan suatu pertemuan yang melibatkan antara Menteri Pertahanan, pimpinan TRI, dan para pemimpin laskar rakyat. Pada pertemuan itu disepakati Badan Pendidikan TRI dialihkan markasnya menjadi di bawah naungan Kementerian Pertahanan yang menterinya adalah Amir Syarifudin dengan diubah namanya menjadi Staf Pendidikan Politik Tentara atau Pepolit.

Pendidikan Politik Tentara (Pepolit)

Setelah reorganisasi Kementerian Pertahanan, Badan Pendidikan pada Markas Tinggi dipindahkan ke Kementerian Pertahanan. Di sini Amir tampak berambisi menguasai tentara karena sejak semula ia sangat bernaflu untuk memberikan pendidikan politik kepada korps perwira tentara, baik dalam upayanya yang sangat tulus untuk "mendemokraskan" dan "mensosialkan" pandangan mereka, maupun, dengan sendirinya, untuk memperkuat kedudukannya sendiri terhadap komandan-komandan yang dekat dengan Sudirman. Kampanye untuk memberikan "keyakinan politik" kepada tentara dilihat sebagai satu upaya untuk mengikat mereka kepada pemerintah, tidak sekedar sebagai alat pemerintah yang kebetulan sedang berkuasa, melainkan juga untuk memberikan pendidikan ideologis kepada tentara sehingga mereka untuk seterusnya akan berada dalam jangkauan golongan yang berorientasi sosialis yang dipimpin oleh Amir. Ini merupakan kemampuannya untuk mencampuri urusan politik tentara.

Ada dua langkah yang diambil Amir untuk mewujudkan idenya itu. Pertama, mendorong pendidikan politik di kalangan tentara. Pendidikan politik ini dimaksudkan untuk memberi jiwa politik pada tentara, menanamkan ide "kerakyatan", membuang paham korporatisme, patronase, faksionalisme dan, meminjam kata-kata Jenderal A.H. Nasution, segala macam "vertikalisme". Kedua, mengkoordinasikan dan mereorganisasi laskar-laskar rakyat dan badan perjuangan yang dibentuk partai politik agar sejalan dengan tuntutan revolusi kemerdekaan.

Pada tanggal 30 Mei 1946, Amir Sjarifuddin mengumumkan terbentuknya badan pendidikan tentara (BPT) sebuah Staf Pendidikan di dalam lingkungan kementeriannya yang bertugas meletakkan garis-garis pedoman bagi pendidikan politik tentara. Staf itu kemudian diubah menjadi Pendidikan Politik Tentara (Pepolit) yang dipimpin oleh opsir-opsir politik tentara atau di singkat opsir politik. Bersamaan dengan itu diadakan acara pelantikan terhadap 55 opsir politik oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifudin yang bertugas sebagai pimpinan Pepolit, serta dilantik juga Sukono Djojopratignjo seorang bekas pegawai kantor pos dan anggota Partai Sosialis yang diberi pangkat Letnan Jenderal seperti pangkat yang disandang oleh Urip Sumoharjo, Kepala Staf TKR. Pimpinan Pepolit dan beberapa anggotanya berasal dari Partai Sosialis, Wijono dari Partai Sosialis, dan Sumarsono dari Pesindo, dan tiga politisi Islam dari Masyumi, Anwar Tjokroaminoto dari PSII, H. Farid Ma'ruf, dan H. Mukti. Dengan demikian, hanya golongan Sosialis dan Masyumi saja yang terwakili di dalam Staf Pendidikan itu, kecuali drg. Mustopo, orang yang agak eksentrik dan bekas komandan batalion dalam Peta, dan pernah menjabat sebagai komandan BKR Surabaya, tidak seorang pun dari mereka berpendidikan militer. Efeknya semua pimpinan lainnya mendapat pangkat mayor jenderal, setaraf dengan Panglima Divisi.

Staf pendidikan membawakan korps Pepolit (Pendidikan Politik Tentara) yang terdiri dari 55 opsir politik yang pada mulanya semuanya diambil dari Pesindo sampai partai-partai lain memprotes pengangkatan yang sepihak itu. Mereka disebar ke seluruh Indonesia di mana kepada setiap divisi diperbantukan lima orang. Kedudukan mereka dalam divisi bebas sama sekali dari panglima divisi, untuk menjamin agar indoktrinasi dapat dilaksanakan bebas dari campur tangan Markas Besar Tentara. Sesungguhnya para perwira telah curiga ketika Amir Syarifuddin menempatkan golongan kiri di divisi-divisi. Kalangan perwira itu merasa tidak suka dengan kehadiran Pepolit. Ketidaksukaan ini terlihat saat rapat kerja para perwira Markas Besar dan panglima. Hal ini kemudian menimbulkan protes dari para perwira terhadap keberadaan serta campur tangan para perwira Pepolit dalam divisi-divisi, terutama masalah pemberian pangkat terhadap perwira Pepolit.

Adanya Pepolit memunculkan permasalahan baru bagi TRI karena dianggap telah dimanfaatkan oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifudin sebagai kendaraan politik dalam menyebarkan sosialisme maupun komunisme di Indonesia. Semua opsir politik mendapatkan tugas untuk merapatkan hubungan tentara dengan rakyat dan pada masing-masing divisi kemudian terdapat lima opsir untuk membantu yang diberi pangkat letnan kolonel. Dalam praktiknya, Pepolit telah menyimpang dari tujuannya yaitu hanya untuk keuntungan kelompok Amir Syarifuddin. Pepolit bahkan dijadikan sebagai tempat untuk menyebarkan ideologi komunis dengan para pengajar yang berasal dari golongan kiri. Pepolit kemudian dapat tumbuh menjadi seperti Komisaris Politik yang hampir sama dengan yang ada di Angkatan Perang Uni Soviet yang memiliki kedudukan setara dengan para komandan. Hal tersebut mendapat reaksi penolakan dari para panglima divisi dan para komandan pasukan, karena dianggap sebagai sarana menyebarkan ideologi komunis.

Kebijakan Amir ini membuat hubungannya dengan Soedirman semakin panas disebabkan pembinaan opsir-opsir politik lewat Pendidikan Politik Tentara (Pepolit). Sebanyak 55 opsir politik yang seluruhnya berasal dari Pemuda Sosialis Indonesia, pendukung Amir, dilantik pada Mei 1946. Puluhan orang itu selanjutnya disebar ke berbagai kesatuan tentara dan diberi pangkat militer. Opsir-opsir Pepolit itu langsung ditempatkan di divisi-divisi. Untuk setiap divisi disediakan lima orang, dan mereka mempunyai kedudukan otonom di samping pimpinan Divisi. Mereka semua berasal dari Pesindo. Dalih yang dikemukakan oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin adalah untuk "mempererat hubungan tentara dengan rakyat." Langkah Amir itu sebagai bentuk ketidakpercayaannya terhadap kepemimpinan Soedirman di tentara. "Amir menempatkan orang-orang kepercayaannya dalam kesatuan militer untuk memata-matai

tentara. Amir dan Soedirman seperti musuh dalam selimut. Penempatan opsir-opsir politik yang berhaluan kiri itu menimbulkan kecurigaan di kalangan perwira-perwira tinggi dan partai-partai, seperti Masyumi, PNI, dan golongan Tan Malaka. Bahkan, beberapa komandan divisi menolak kehadiran opsir Pepolit karena dianggap dapat menimbulkan perpecahan dalam tentara dengan menonjolkan perbedaan-perbedaan politik serta mendorong timbulnya klik-klik dan sikap pilih bulu. Diperkirakan pula kehadiran mereka akan mempengaruhi sistem kenaikan pangkat berdasar pada kriteria-kriteria politik.

Sikap tidak suka terhadap kehadiran Pepolit tersebut antara lain terlihat di dalam rapat kerja yang pertama antara para perwira Markas Besar dan para panglima. Banyak perwira memprotes keberadaan perwira-perwira Pepolit serta campur tangan mereka dalam divisi-divisi. Menghadapi persoalan ini para panglima divisi menentukan sikapnya masing-masing, karena Markas Besar sendiri belum siap untuk mengajukan suatu pemecahan. Sejumlah panglima mengizinkan kehadiran opsir-opsir politik di dalam divisi-divisi mereka, sedang yang lainnya berusaha mencegah. Kolonel Gatot Subroto, misalnya, tidak pernah mengakui adanya opsir politik di kesatuannya. Sikap permusuhan itu bukan saja ditujukan terhadap korps Pepolit, tetapi juga terhadap Staf Pendidikan, yang fungsi serta eksistensinya ditolak mentah-mentah oleh para perwira. Pemberian pangkat-pangkat yang tinggi kepada para politisi yang duduk di dalamnya telah menimbulkan kejengkelan dan iri hati yang mendalam di kalangan korps perwira.

Di dalam rapat pertama antara MBT dengan para Komandan divisi, Jenderal Sudirman diujani protes oleh mereka atas adanya opsir-opsir politik itu. Terhadap protes-protes itu Jenderal Sudirman menjelaskan bahwa semuanya telah berjalan di luar pengetahuannya. Ia minta kepada Kolonel T.B. Simatupang untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Tetapi ternyata penjelasan itu tidak dapat memuaskan mereka. Kebanyakan para Komandan Divisi tidak dapat menerima kehadiran opsir-opsir politik itu berdiri sendiri secara otonom di lingkungannya.

Masalah politik di lingkungan tentara ini kemudian jadi meluas. Biro perjuangan praktis dikuasai golongan kiri. Jenderal Mayor Joko Suyono telah diangkat sebagai kepala Biro Perjuangan Pusat sedangkan Jenderal Mayor Sakirman, Jenderal Mayor Kusnandar atau Kolonel Sutoko telah pula ditunjuk sebagai koordinator pada provinsi-provinsi. Semuanya adalah pemuka-pemuka Sosialis. Tindakan Amir Syarifuddin ini ternyata telah menimbulkan kecurigaan pada partai-partai politik lainnya, terutama Masyumi, PNI dan kelompok Tan Malaka.

Berikutnya terjadi perlawanan dari Markas Besar Tentara yang mengumumkan bahwa telah dibentuk sebuah Dewan Penasihat pimpinan tentara dengan tugas untuk memberikan nasehat kepada Markas Besar mengenai soal-soal politik. Selain itu, para panglima divisi diminta juga untuk membentuk badan-badan penasihat pada tingkat mereka. Dengan membentuk suatu pembangkangan pihak tentara bertindak lebih jauh lagi dalam menentang kementerian pertahanan dengan jalan mengangkat tokoh-tokoh pemuda yang terkemuka sebagai penasihat-penasihat mereka, yang kebanyakannya tegas-tegas menentang pemerintah.

Fakta lainnya tentang penempatan opsir politik yang dikaitkan dengan adanya upaya reorganisasi TRI yang berusaha menempatkan kelompok kiri dalam organisasi tentara yang ditindaklanjuti dengan membentuk Biro Perjuangan. Biro Perjuangan merupakan badan pelaksana yang ada di Kementerian Pertahanan untuk menampung beberapa laskar yang sebelumnya telah didirikan oleh partai politik. Apabila ditinjau dari segi ketahanan nasional, maka dibentuknya biro tersebut sangat menguntungkan pemerintah karena laskar perjuangan yang awalnya terpecah di berbagai kelompok ideologi atau sebagai sayap partai politik dapat disatukan dan dikendalikan pemerintah. Pemerintah memiliki potensi cadangan yang tangguh dan besar di samping tentara reguler. Biro perjuangan dalam perkembangannya telah digunakan sebagai arena adu kekuatan untuk menandingi tentara reguler.

Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin telah berusaha dengan keras memakai Biro Perjuangan sebagai kendaraan politik. Amir Sjarifuddin selanjutnya menunjuk Djokosujono dan

Ir. Sakirman yang berhaluan komunis menjadi Kepala dan Wakil Kepala Biro Perjuangan. Hal itu berakibat terjadinya dualisme pada aspek pertahanan nasional. Tentara reguler pimpinan Jenderal Soedirman dan laskar perjuangan yang secara *de facto* dalam naungan Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin melalui Biro Perjuangan. Laskar perjuangan mempunyai posisi dan tugas yang persis dengan TRI, tetapi bedanya TRI milik nasional dan laskar milik partai politik. Presiden Soekarno mengerti persoalan dualisme pertahanan, sehingga dua kekuatan disatukan menjadi TNI pada Juni 1947. Laskar yang berideologi komunis sebagian besar tidak mau bergabung dengan TNI dan mereka ditampung dalam wadah TNI Bagian Masyarakat yang dibentuk pada Agustus 1947 di bawah pimpinan Ir. Sakirman.

Pada pembentukan TNI Bagian Masyarakat terdapat dua kelompok yang berseberangan dalam menanggapi fenomena tersebut. Pihak pro, yaitu Menteri pertahanan Amir Sjarifuddin dan Menteri Muda Pertahanan Arudji Kartawinata yang berpendapat bahwa TNI Bagian Masyarakat dan Pepolit sebagai konsekuensi dari prinsip pertahanan, di mana tentara harus dikenalkan pada politik agar mereka sadar membela kepentingan politik apabila suatu saat pertentangan politik memuncak dan berubah menjadi perang. Sedangkan Pihak yang kontra, yaitu PNI dan Masyumi. PNI berpendapat bahwa TNI Bagian Masyarakat bukan tentara melainkan organisasi sayap politik karena hampir 100% pemimpinnya ada di tangan sayap kiri, maka diusulkan agar pimpinan diubah dengan memasukkan semua organisasi rakyat, sehingga tercipta *fighting democracy*. PNI setuju dalam prinsip, tetapi menolak monopoli kepemimpinan sayap kiri. Masyumi menolak dan menganjurkan untuk membubarkan TNI Bagian Masyarakat.

Pada dasarnya TNI Bagian Masyarakat dan Pendidikan Politik Tentara hanya menjadi kendaraan politik Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin dalam menyebarkan paham atau ideologi komunis. Pepolit juga merupakan alat Amir untuk menarik TRI ke dalam wewenang pemerintah sipil. Keberadaan Pepolit ditentang Markas Besar Tentara. Kolonel Gatot Soebroto pernah menolak keberadaan opsir politik di kesatuannya. Soedirman juga dengan tegas menolak militer dipimpin sipil yang dia anggap terlalu gemar berdiplomasi dengan musuh. Hal tersebut mendapatkan berbagai reaksi dari beberapa kalangan.

Sikap Sudirman

Presiden Sukarno saat itu memutuskan pembentukan Dewan Pertahanan Negara dan Dewan Militer. Jenderal Sudirman dan Letnan jenderal Urip duduk sebagai anggota. Sudirman merasakan betapa sulitnya mengatur pertahanan negara. Sudirman, pada bulan itu ditunjuk untuk memimpin seluruh komponen TRI Darat, Laut, dan Udara, dengan ketentuan bahwa tentang susunan dalam tiap-tiap bagian tersebut yang bertanggung jawab ialah pemimpinnya sendiri. Dengan demikian, Sudirman makin sulit kedudukannya. Tidak jelas pembagian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ia harus menjaga keutuhan dan persatuan. seluruh kekuatan perjuangan. Dalam salah satu pengumuman yang dikeluarkannya ia menegaskan bahwa: "Guna kepentingan pertahanan dan keselamatan negara kita sendiri, maka kami perintahkan kepada seluruh pemimpin Tentara Darat, Laut, dan Udara supaya mulai saat ini juga semua pekerjaan dan Tindakan disesuaikan dengan keadaan bahaya yang sangat mengancam kita. Kepada Badan Perjuangan serta barisan-barisan di luar Tentara, kami anjurkan pula supaya bersama-sama dengan pihak Tentara menyesuaikan perjuangannya, dengan keadaan bahaya yang telah tampak di depan mata kita dengan nyata! Sewajibnya pengumuman ini sama diperhatikan dan dikerjakan semestinya!"

Sudirman berusaha untuk tetap berpegang pada bidang tugasnya. Kepada segenap tentara ia memerintahkan, sedangkan kepada badan-badan perjuangan dan barisan-barisan ia hanya menganjurkan. Sudirman tidak mempunyai wewenang komando langsung atas badan-badan

tersebut. Kepada para Taruna Militer Akademi di Yogyakarta ia menekankan: "Meskipun kamu mendapat latihan jasmani yang sehebat-hebatnya tidak akan berguna jika kamu mempunyai sifat menyerah! Kepandaian yang bagaimanapun tingginya tidak ada gunanya jika orang itu mempunyai sifat menyerah. Tentara akan hidup sampai akhir zaman, jangan menjadi alat oleh suatu badan atau orang. Tentara akan timbul tenggelam bersama-sama negara!"

Adanya pro dan kontra atas kehadiran Pepolit dan badan perjuangan yang dijadikan kendaraan politiknya Amir Syarifudin berujung pada kandasnya kedua kendaraan politik yang dibuat oleh Amir Syarifudin atau kaum kiri saat itu. Akan tetapi keinginan untuk menguasai tentara masih tetap berlanjut seperti ide tentang Reorganisasi dan Rasionalisasi yang diajukan setahun berikutnya.

Re-Ra

Gagasan untuk melaksanakan rasionalisasi di kalangan Angkatan Bersenjata mula-mula dicetuskan oleh Z. Baharuddin seorang anggota KNIP dari fraksi sayap kiri dalam bentuk mosi yang diajukan pada 20 Desember 1947 yang memuat dua hal pokok yakni; (1) Rasionalisasi dalam kesatuan Angkatan Perang (darat, laut, udara) serta dalam komando dan pimpinan angkatan perang. (2) Menteri Pertahanan bertanggungjawab penuh dalam masalah angkatan perang baik dalam hal organisasi maupun dalam hal siasat militer. Mosi itu oleh pemerintah dianggap masuk akal dan dilaksanakan dengan berpedoman kepada cita-cita satu tentara, satu komando dalam bentuk dan susunan yang efektif. Maksud dan kesanggupan pemerintah itu disampaikan oleh menteri Muda Pertahanan Arudji Kartawinata dalam sidang KNIP.

Kabinet Hatta yang menggantikan kabinet Amir Syarifudin pada awal tahun 1948 tetap melaksanakan Program Rasionalisasi melanjutkan rencana kabinet sebelumnya. Tetapi Rasionalisasi yang dimaksudkan berbeda dengan sebelumnya seperti pemindahan tenaga dari lapangan yang non produktif ke lapangan yang produktif. Dasar daripada rasionalisasi ialah keadaan perekonomian negara pada waktu itu. Tujuan rasionalisasi adalah untuk memerangi inflasi yang melanda Negara. Alasan Rasionalisasi, akibat perjanjian Renville secara geografis wilayah RI menjadi sempit. Daerah yang dikuasai hanya beberapa keresidenan di Jawa dan di Sumatera yang berada dalam keadaan sosial-ekonomis yang cukup parah akibat blokade Belanda. Dalam sidang KNIP Hatta menyatakan bahwa bagaimanapun sulitnya rasionalisasi harus terlaksana. Dalam rangka rasionalisasi itu, TNI-Masyarakat yang berjumlah 90.000 orang akan dihapus sedangkan laskar-laskar lainnya akan dilebur ke dalam TNI dan harus patuh kepada komandan-komandan TNI. Di bidang organisasi, reorganisasi akan diadakan dengan penyederhanaan yang disesuaikan dengan persenjataan dan *manpower*. Reorganisasi ini dimulai dari pucuk pimpinan TNI.

Rera yang berbeda dari maksud semula membuat keinginan menguasai tentara menjadi sirna. Jika dalam Pepolit tentara menentang tetapi pada Rera tentara justru mendukungnya. Hal ini merupakan kekalahan yang diderita dari kaum kiri saat itu dan merambat kepada peristiwa Pemberontakan Madiun di bulan September 1948.

Simpulan

Pada Januari sampai dengan Februari 1965 PKI menuntut perlunya mempersenjatai massa untuk menghadapi Nekolim (neo kolonialisme). Tuntutan Aidit disambut hangat oleh berbagai organisasi afiliasi komunis dan Partindo. Soekarno yang mengetahui sikap Angkatan Darat yang menentang asal usul seperti itu, pada tahap tersebut tidak bersedia berbuat lebih daripada mengemukakan janjinya-janjinya di hadapan suatu rapat umum SOBSI pada 12 Februari 1965 bahwa, "jika perlu", massa akan dipersenjatai untuk menghadapi Nekolim. Dia bukannya

menentang gagasan untuk mempersenjatai kaum buruh dan tani, tetapi dia beranggapan persoalan ini terlebih dulu perlu dibebaskan di hadapan umum untuk beberapa lama sebelum dapat dipaksakan kepada Angkatan Darat. Setelah menyadari bahwa tuntutan untuk memperoleh senjata tidak akan dipenuhi dalam waktu yang singkat, PKI menempuh jalan lain dan menuntut agar Nasakomisasi dilaksanakan di dalam Angkatan Darat. Tidak begitu jelas apa yang dipikirkan oleh Aidit ketika itu, akan tetapi, seperti yang Sundahusen katakan, rupanya dia membayangkan kehadiran komisar-komisaris politik dalam Angkatan Bersenjata, mungkin dengan mencontoh Angkatan Bersenjata Cina atau sistem Pepolit yang pernah dikenal dalam tahun 1946. Sampai di sini tuntutan kaum kiri untuk memiliki tentara tetap bergaung sampai dengan tahun 1965 hingga tibanya pemberontakan PKI di bulan September 1965. Pepolit merupakan awal dari keinginan kaum kiri membentuk postur tentara yang diinginkannya selepas Indonesia merdeka dan awal dari dibentuknya tentara nasional di Indonesia.

Referensi

- Cribb, R. B. (1990). *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949*. PT Pustaka Utama Grafiti.
- Dinas Sejarah TNI AD. (1982). *Dharma Bhakti TNI AD dalam Tugas Internasional*. Dinas Sejarah TNI AD.
- Kedaulatan Rakyat. (1946).
- Kusuma, E. (2022). *Historiografi (Kaum) Militer Indonesia*. Kusuma Espe.
- Markas Besar TNI Pusjarah dan Nilai Tradisi TNI. (2000). *Sejarah TNI Jilid I (1945-1949)*. Pusjarah dan Nilai Tradisi TNI.
- Morgenthau, H. J. (2010). *Politik Antarbangsa (Edisi revisi)*. Yayasan Pustaka Obor.
- Mrazek, R. (1996). *Sjahir: Politik dan Pengasingan di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Muthanna, K. A. (2011). Military diplomacy perspectives. *Journal of Defence Studies Military Diplomacy*, 5(1), 1–12.
- Nurjohan. (2013). *Kolonel Mohamad Nuh Penentu Terpilihnya Panglima Besar Jenderal Sudirman*.
- Ramadhan, K. H. (2008). *A.E. Kawilarang: Untuk Sang Merah Putih (Cet. ke-3)*. Pustaka Sinar Harapan.
- Soe, H. G. (2005). *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Bentang.
- Sudirman. (2002). *Prajurit TNI Teladan*. Disjarahad.
- Sundhaussen, U. (1986). *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*. LP3ES.
- Suryohadioprojo, S. (2005). *Sivis Pacem Para Bellum*. Gramedia.
- Suryohadioprojo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Perang*. Pustaka Intermedia.
- Sutanto, H. (2009). *Menjadi TNI*. Kata Penerbit.
- Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia No. 34 Tahun 2004*.
- Waugh, J., & Gallagher, G. W. (Eds.). (2009). *Wars within a War: Controversy and Conflict over the American Civil War*. University of North Carolina Press.